

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang kaya berlimpah ruah akan sumber daya alamnya. Namun, hal tersebut tidaklah berpengaruh terhadap kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia terus menerus semakin meningkat. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, dimana jumlah penduduknya kurang lebih 262 juta jiwa, dan sebanyak 87.6% penduduknya adalah beragama Islam. Menurut data BPS pada bulan Maret tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia telah mencapai 27,77 juta orang (10,64% dari jumlah total penduduk saat itu).¹ Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin per Maret 2017 mengalami pertambahan sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan jumlah penduduk pada bulan September 2016.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di bulan September 2017 tercatat sebesar 10,12%. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan bahwa, “Penurunan tingkat kemiskinan selama Maret-September 2017 terjadi karena terkendalinya inflasi, yaitu hanya sebesar 1,45%.”² Angka kemiskinan pada bulan September 2017 menunjukkan terjadinya penurunan dibanding pada bulan September 2016 sebesar 10,7% dan Maret 2017 yang

¹ Badan Pusat Statistik, *Data Laporan Statistik Maret 2017*, <http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 7 Maret 2018 pukul 21.02 WIB.

² Badan Pusat Statistik, *Data Laporan Statistik September 2017*, <http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 7 Maret 2018 21.25 WIB.

sebesar 10,64%. Pada September 2017 pencapaiannya (persentase penduduk miskin) merupakan yang paling bagus, dimana penurunannya lebih cepat selama tujuh tahun terakhir.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyebutkan bahwa rencana kerja pemerintah untuk target persentase kemiskinan pada 2018 ini berada di kisaran 9,5 - 10 persen.”³ Mengingat perkembangan penurunan angka kemiskinan di Indonesia ini menjadi momentum yang baik untuk menurunkan angka kemiskinan hingga jumlahnya mencapai *single digit* secara berkala.

Meskipun demikian, bukan berarti usaha pemerintah akan berhenti mengetahui adanya penurunan angka kemiskinan. Keberhasilan kali ini justru memotivasi pemerintah untuk terus berinovasi membuat program-program menarik guna mengentas jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia. Tidak dipungkiri bahwasanya sampai hari ini kemiskinan masih menjadi permasalahan kronis yang cukup lama dialami oleh negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia.

Berbagai program pengentasan kemiskinan dirasa masih belum cukup terlihat baik hasilnya karena masih kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Mayoritas yang menjadi penyebab mendasar terjadinya hal ini adalah banyaknya program pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran. Oleh sebab itu, sangat diperlukan adanya cara yang berkesinambungan untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui program pembangunan nasional yang

³ Shintaloka Pradita Sicca, *Target angka kemiskinan di tahun 2018 sebesar 9,5 hingga 10 persen*, <https://tirto.id/pemerintah-targetkan-angka-kemiskinan-2018-sebesar-95-persen-cCZ3>, tulisan 9 Januari 2018, diakses pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 19.00 WIB.

saling bersinergi antara berbagai lapisan elemen masyarakat serta memiliki progres yang berkelanjutan.

Persoalan kemiskinan sebenarnya dapat ditekan melalui pertumbuhan pembangunan yang baik di Indonesia. Pembangunan nasional yang baik diharapkan mampu menggerakkan perubahan struktural yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Pembangunan yang sukses dapat ditandai dengan terwujudnya masyarakat makmur sejahtera, adil dan merata. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari sisi kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi seiring dengan meningkatnya pendapatan. Pendapatan yang terus meningkat merupakan hasil dari produksi yang meningkat pula.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyusun berbagai agenda pembangunan ekonomi. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan usaha. Tidak terkecuali program yang telah diupayakan secara berkesinambungan oleh pemerintah dalam menopang pembangunan ekonomi yaitu memberdayakan dan menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai *basic* pembangunan ekonomi kerakyatan.

Dalam sejarah juga telah menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia mampu bertahan dan tetap eksis ditengah krisis ekonomi pada tahun 1997, bahkan disitu UMKM menjadi salah satu penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa. Dengan kemampuannya yang produktif mampu memberikan sumbangsih yang efektif dalam penyerapan tenaga kerja yang secara otomatis

dapat mengurangi jumlah pengangguran pada masa krisis moneter di Indonesia pada masa itu.

Selain hal tersebut, peran penting UMKM juga terlihat pada kemampuannya untuk dapat memberikan andil besar terhadap penerimaan pendapatan negara dengan menyumbang pemasukan *product domestic bruto* (PDB). Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM, AAGN Puspayoga di Jakarta menyampaikan bahwa kontribusi anggota koperasi terhadap PDB nasional yakni sekitar Rp 3.114.139,6 milyar atau 30,84% dari total PDB nasional. “Anggota koperasi skala usaha kecil Rp 318.428 milyar atau 0,53% dan anggota koperasi skala usaha menengah Rp 29.189 milyar atau 0,05%,” kata Puspayoga. Sedangkan untuk kontribusi UMKM terhadap PDB nasional adalah Rp 7.005.950 milyar atau sekitar 62,57% dari total PDB. Jika diperhitungkan menurut skala usaha, koperasi UMKM pembentuk kontribusi PDB UMKM adalah 38,90% usaha mikro, sebesar 9,73% usaha kecil, dan 13,95% usaha menengah.⁴

Sebagian besar (hampir 99 %) UMKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. Eksistensi dari UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi.

⁴ Legal Era.id, <https://legaleraindonesia.com/ini-kontribusi-koperasi-dan-umkm-terhadap-pdb-nasional-2017/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2018, pukul 13.30 WIB.

Keberadaan UMKM di Indonesia ini telah berhasil membuktikan bahwa ia memiliki peran yang penting dalam hal menekan atau mengurangi jumlah pengangguran. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Selain itu kinerjanya selama ini terbukti dapat berperan dalam proses pemerataan maupun peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas perekonomian nasional.

UMKM ini sangat erat kaitannya dengan perdagangan. Salah satu faktor penggerak utama pembangunan perekonomian nasional tak lain bersumber pada perdagangan. Fakta di lapangan perdagangan yang terjadi pada berbagai belahan dunia mampu memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi mencapai kepentingan nasional.

Pada lain sisi, seiring pesatnya perkembangan zaman maka teknologi pun juga semakin berkembang. Teknologi informasi yang semakin canggih mampu menciptakan terbukanya batas-batas negara sehingga semakin tanpa batas. Dalam artian, terjadinya implementasi perdagangan tanpa batas juga dapat dilihat dari terbentuknya kebijakan pasar bebas di berbagai belahan dunia saat ini. Salah satu contoh yang telah dirasakan oleh negara Indonesia adalah adanya pembentukan komunitas ASEAN yang terdiri dari Negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos,

Myanmar dan Kamboja. Pimpinan negara Indonesia dan 9 negara anggota ASEAN telah menyatakan sepakat untuk menerapkan ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tanggal 31 Desember 2015 guna mendukung ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau Pasar Bebas Asia Tenggara.

Dampak positif dari kesepakatan MEA tersebut tentunya diharapkan dapat menguntungkan negara-negara ASEAN dalam menyambut Pasar Bebas ASEAN. MEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. Bagi negara Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik untuk bersaing. Hal tersebut dikarenakan hambatan perdagangan seperti yang disebutkan diatas akan cenderung berkurang, sehingga mampu menyebabkan *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia akan semakin meningkat.

Dalam rangka menghadapi era pasar bebas se-Asia Tenggara tersebut, dunia usaha di Tanah Air dan pemerintah tentu harus mengambil langkah-langkah strategis, agar dapat menghadapi persaingan dengan negara anggota ASEAN lainnya, tak terkecuali pada sektor UMKM. Posisi UMKM dalam pasar bebas ASEAN bagi negara Indonesia dan negara ASEAN lainnya merupakan salah satu bagian yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional. Melalui modal yang sedikit bisa membangun usaha kecil, teknologi yang digunakan sangat sederhana sehingga bersifat padat karya yang menyerap

banyak tenaga kerja. Dengan penyerapan banyak tenaga kerja tersebut berarti mengurangi jumlah pengangguran hingga pada akhirnya mampu mengurangi jumlah kemiskinan secara nasional.

Namun demikian, seiring ketatnya daya saing pada negara-negara ASEAN muncullah berbagai hambatan yang ditemui di Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan yang masih ditemui di lapangan, dimana dalam penyelesaiannya belum tuntas dengan berbagai keterbatasan masing-masing UMKM. Hal tersebut meliputi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang besar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, dan keterbatasan komunikasi. Keterbatasan tersebut menjadi beberapa kendala yang harus ditemui dalam usaha meningkatkan daya saing UMKM.

Kendala internal lainnya yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum tepat. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat didirikan untuk menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri yaitu usaha yang merupakan milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*bankable*), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.

Selain itu, UMKM harus menghadapi persoalan eksternal ataupun domestik yang tidak kunjung selesai, seperti masalah keterbatasan akses pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi, pungutan liar, korupsi oleh

aparatur daerah dan lain-lain. Dengan adanya persoalan tersebut, maka potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat sehingga menyebabkan lemahnya daya saing terhadap produk impor.

Masalah yang sering dihadapi dan sekaligus menjadi kelemahan UMKM adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus sehingga perkembangannya hanya mengalami stagnasi.

Dalam upaya memperkuat UMKM sebagai fundamental ekonomi nasional, perlu kiranya diciptakan iklim investasi domestik yang kondusif dalam upaya penguatan pasar dalam negeri agar UMKM dapat menjadi penyangga (*buffer*) perekonomian nasional. Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia.

Salah satu upaya yang sangat penting untuk dilakukan demi menjaga daya saing UMKM, adalah dengan memaksimalkan strategi pemberdayaan UMKM agar dapat bersaing tidak hanya pada wilayah persaingan lokal saja, namun juga mampu mencetak produk berkualitas yang bisa memiliki daya saing tinggi dengan Negara ASEAN lainnya atau bahkan mampu meroket hingga kancah Internasional. Salah satu langkah yang efektif

untuk ditempuh adalah dengan mengembangkan kapasitas (*capacity building*) UMKM.

Secara umum *Capacity Building* merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai macam strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerja. Ruang lingkup *Capacity Building* meliputi tiga dimensi yaitu sumber daya manusia, organisasi dan reformasi ke lembaga.⁵ Pada era kekinian, penguatan organisasi menjadi tema yang sangat penting mengingat dalam pertumbuhannya, organisasi menghadapi tuntutan-tuntutan baik internal maupun eksternal yang timbul sejalan dengan keberadaannya. Oleh karena itu, organisasi dihadapkan pada kenyataan bahwa ia harus meningkatkan kemampuan yang selaras dengan tuntutan perubahan tersebut. Usaha yang dilakukan ini tidak lain diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pemasukan dari kegiatan ekspor barang/produk asli buatan anak dalam negeri.

Disisi lain pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi merupakan hal yang penting karena merupakan investasi yang dikeluarkan untuk memperbaiki kapasitas produktif dari manusia. Dengan adanya SDM yang baik, maka sebuah organisasi akan memiliki keunggulan kompetitif guna meningkatkan daya saing. SDM yang memiliki berbagai kompetensi pada sesuai yang dibutuhkan akan mempercepat tercapainya visi misi organisasi. Selain itu, peran dari sumber daya manusia dalam era global ini juga memiliki

⁵ Keban T. Jeremias, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*, (Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2008), hal. 7

andil tersendiri dalam rangka pengembangan UMKM untuk tetap bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan dari berbagai pesaing baik pelaku usaha lokal maupun pelaku usaha asing. Pada penerapannya perlu adanya pengembangan dalam rangka peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar bebas ASEAN. Beberapa contoh upaya yang sudah dilakukan diantaranya melalui penyaluran perkreditan (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro, dan pengembangan *information technology* (IT).

Dalam perkembangannya UMKM telah menunjukkan peranan cukup baik dalam perekonomian nasional, namun seiring dengan pesatnya kemajuan zaman masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Baik kendala tersebut bersifat internal maupun eksternal. Terdapat beberapa kendala yang masih ditemui dan sangat rentan terhadap masalah-masalah perekonomian. Upaya-upaya demi meningkatkan daya saing UMKM di ranah global telah dilakukan semaksimal mungkin pada berbagai lapisan daerah di Indonesia termasuk daerah Tulungagung. Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Tulungagung terletak 154 km barat daya Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai potensi-potensi sumber daya alam khas. Salah satunya adalah sumber daya marmer, dimana sering kita mendengar bahwa Tulungagung ini adalah kotanya marmer.

Sektor UMKM di Kabupaten Tulungagung tidak hanya terfokus pada industri marmer, melainkan masih banyak sektor lain yang perlu didampingi agar terus berkembang hingga mampu menembus daya saing di pasar manca negara. Sektor ini meliputi: sektor perdagangan, industri pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor jasa. Dalam pengembangan wilayah Kabupaten Tulungagung telah diterapkan pengembangan ekonomi lokal dengan produk unggulan berbahan dasar marmer seperti keramik, aksesoris, dan lain-lain. Dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM ada beberapa lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang ikut serta dalam proses pengembangan kualitas maupun kuantitas UMKM di Kabupaten Tulungagung.

Berlakunya system pasar bebas ASEAN menjadi titik rawan perjuangan UMKM dan ekonomi kerakyatan dengan berbagai kemudahan perdagangan antar negara seperti pembebasan bea impor dan kemudahan birokrasi akan mendorong meningkatnya impor komoditas ke negara-negara ASEAN. Iklim perdagangan tidak hanya akan didominasi oleh negara-negara ASEAN saja, akan tetapi juga perlu dipertimbangkan kehadiran China dengan produk-produknya yang memiliki daya saing tinggi dilihat dari harga dan kemajuan teknologi. Tidak jarang di Tulungagung sendiri kitapun banyak menjumpai para pelaku usaha yang berasal dari Negara China tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan sumber daya manusia khususnya untuk menghadapi pasar bebas ASEAN.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengambil tempat penelitian yaitu pada UD Sehati dan UD Bintang Antik Sejahtera di Tulungagung. Pertimbangan pengambilan lokasi penelitian ini diantaranya yaitu mengingat bahwa kedua lokasi tersebut tergolong dalam kategori UMKM di Kabupaten Tulungagung.

Penulis memilih objek penelitian di Tulungagung karena di daerah tersebut sudah banyak bermunculan UMKM mulai dari usaha mikro, usaha kecil, hingga usaha menengah sehingga penulis tertarik untuk mengkajinya secara mendalam sejauh mana penerapan strategi pemberdayaan UMKM melalui *Capacity Building* dalam usaha tersebut yang ditarik dalam kacamata Ekonomi Islam, apakah usaha tersebut menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam operasionalnya untuk meningkatkan daya saing ataukah tidak. Hal ini menarik untuk penulis teliti, untuk itulah judul "*Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Capacity Building Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UD SEHATI dan UD Bintang Antik Sejahtera Di Tulungagung)*" ini dipilih penulis untuk dikaji dalam tesis ini.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka secara general penelitian ini terfokus dan ingin mengungkap strategi pemberdayaan UMKM melalui *Capacity Building* dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN Perspektif

Ekonomi Islam. Fokus tersebut rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan UMKM melalui *Capacity Building* dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN pada UD SEHATI dan UD Bintang Antik Sejahtera di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pemberdayaan UMKM melalui *Capacity Building* dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN pada UD SEHATI dan UD Bintang Antik Sejahtera di Kabupaten Tulungagung perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan memahami:

1. Untuk mendiskripsikan pemberdayaan UMKM melalui *Capacity Building* dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN pada UD SEHATI dan UD Bintang Antik Sejahtera di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendiskripsikan pemberdayaan UMKM melalui *Capacity Building* dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN pada UD SEHATI dan UD Bintang Antik Sejahtera di Kabupaten Tulungagung perspektif Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan tentang strategi pemberdayaan UMKM melalui *capacity building*, sehingga diharapkan bisa meningkatkan daya saing para pelaku UMKM di Indonesia

dalam menghadapi pasar bebas. Menjadi harapan adalah para pelaku UMKM mampu meningkatkan pendapatan per kapita penduduk, memiliki kontribusi yang baik bagi kemajuan pembangunan Negara.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha khususnya muslim agar mengetahui tentang bagaimana pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha. Dengan demikian mereka akan lebih menyadari pentingnya upaya pemberdayaan UMKM melalui *Capacity Building* untuk menghadapi Pasar Bebas ASEAN dalam perspektif Ekonomi Islam.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih mendalam mengenai topik dengan fokus serta *setting* yang lain sehingga memperkaya temuan penelitian ini.

c. Bagi pembaca

Dapat menambah ilmu pengetahuan sehingga memperluas wawasan pembaca, serta memberikan informasi untuk lebih meningkatkan kualitas usaha melalui pengembangan kapasitas atau *capacity building* perspektif Ekonomi Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan penjelasan agar maksud dan artinya menjadi jelas, sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Pemberdayaan adalah perubahan terhadap komponen-komponen organisasi seperti struktur, strategi, sistem dan perilaku manusia yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dari perusahaan.⁶
- b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.⁷
- c. *Capacity Building* adalah upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai macam strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerja. Ruang lingkup *Capacity Building* meliputi tiga dimensi yaitu sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan.⁸
- d. Pasar Bebas ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Tujuan utama MEA 2015 adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi,

⁶ Achmad Sobirin, *Meraih Keunggulan Melalui Pengintegrasian Sumber Daya Manusia dan Perencanaan Strategik*, Edisi Khusus Jurnal Siasat Bisnis On Human Resources, hal. 2

⁷ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : isu-isu penting*, (Jakarta : LP3ES, 2012), hal. 11.

⁸ Jeremias Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*, (Yogyakarta : Penerbit Gava Media, 2008), hal.

yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas.⁹

2. Secara Operasional

Secara operasionalnya kajian dalam judul ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan strategi pemberdayaan UMKM melalui *Capacity Building* dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN, dimana perusahaan yang dijadikan tempat penelitian adalah UD SEHATI dan UD Bintang Antik Sejahtera Di Tulungagung. Adapun indikator-indikator dalam penelitian ini adalah *untuk menganalisis Pemberdayaan UMKM Melalui Capacity Building Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UD SEHATI dan UD Bintang Antik Sejahtera di Tulungagung)*.

⁹ Ditjen PEN/WRT/04/I/2015 edisi Januari dalam Warta Ekspor Edisi Januari 2015